



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Nomor : 2666.1/PR.03.02/10/2018

Jakarta, 31 Oktober 2018

Perihal : Penyampaian Pemutakhiran Rencana Kerja (Renja)
Mahkamah Konstitusi Tahun 2019

Lampiran : 1 berkas dokumen

Kepada Yth.:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
2. Menteri Keuangan

di

Tempat

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L, bersama ini kami sampaikan Pemutakhiran Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2018 yang kami sampaikan melalui "submit" di Sistem Informasi KRISNA pada tanggal 31 Oktober 2018.

Selain itu, terlampir kami sampaikan *print out* Rekap 1 K/L, Rekap 2 Program K/L, Rekap 3 Kegiatan K/L dari Pemutakhiran Rencana Kerja (Renja) Mahkamah Konstitusi yang telah kami submit melalui sistem informasi KRISNA tersebut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 2. VISI : Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya
 3. MISI : 1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi
 2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara

4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL	ALOKASI 2019 (RIBU)
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	242.348.836,00
Total		242.348.836,00

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara		336.280.945,00
01.01	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	80	
01.02	Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota yang diputus	0	
01.03	Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yang diputus	100	
01.04	Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	60	
01.05	Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati, PHP Walikota	0	
01.06	Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	100	
02	Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara		0,00
02.01	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Penanganan Perkara	75	
02.02	Tingkat Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Perkara	60	
03	Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusi		0,00
03.01	Tingkat Tersedianya Kebijakan Penanganan Perkara	100	
03.02	Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara	80	
04	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya		173.294.478,00
04.01	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi	70	
05	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online		0,00
05.01	Indeks Aksesibilitas terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online	70	
06	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi		30.069.978,00
06.01	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	75	
07	Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi		0,00
07.01	Indeks Persepsi Media	70	
08	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK		0,00
08.01	Persentase Permohonan yang Diregistrasi	90	
Total			539.645.401,00

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
077.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	162.670.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.670.897,00	235.984.966,00	201.572.209,00	215.968.527,00
077.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00	20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00
077.01.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	336.280.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.280.945,00	219.453.140,00	186.786.868,00	218.394.483,00
077.01.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	30.069.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069.978,00	48.813.325,00	53.694.658,00	59.064.123,00
Total		539.645.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.645.401,00	524.551.431,00	463.728.735,00	513.464.633,00

Jakarta, 01 November 2018
 Sekretaris Jenderal



REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara
04 - Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya
07 - Meningkatkan Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi
3. PROGRAM : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Mahkamah Konstitusi RI
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
Total		0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel		85.689.970,00
01.01	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	
01.02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	
02	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien		76.980.927,00
02.01	Nilai Reformasi Birokrasi	85	
02.02	Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi	95	
02.03	Tingkat Penerapan e-Office	70	
02.04	Persentase Tindakan/ Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	90	
02.05	Tingkat Penerapan e-Court	70	
03	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administrasi MK		0,00
03.01	Indeks Pelayanan Administrasi Umum	75	
04	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional		0,00
04.01	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	
04.02	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai berskala Internasional	100	
04.03	Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi	80	
05	Meningkatnya Lingkup Penyebaran Informasi Konstitusi		0,00
05.01	Indeks Persepsi Media	70	
05.02	Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi	100	
Total			162.670.897,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	162.670.897,00
01.01	Opini BPK atas Laporan Keuangan	
01.02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
01.03	Nilai Reformasi Birokrasi	
01.04	Persentase Penyerapan Anggaran	
01.05	Tingkat Penerapan e-Office	
01.06	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan	
01.07	Tingkat Penerapan e-Court	
01.08	Indeks Pelayanan Administrasi Umum	
01.09	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai	
01.10	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Berskala Internasional	
01.11	Persentase Program Diklat yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Kompetensi	
01.12	Indeks Persepsi Media	
01.13	Tingkat Penyebaran Produk Informasi Mahkamah Konstitusi	
Total		162.670.897,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
3366	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah	17.468.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468.273,00	64.738.180,00	21.711.998,00	23.883.198,00
3367	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana	60.194.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.194.754,00	70.171.571,00	68.677.643,00	69.784.319,00
3369	Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	74.972.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.972.322,00	82.509.748,00	90.760.724,00	99.836.795,00
5238	Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian	10.035.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035.548,00	18.565.467,00	20.421.844,00	22.464.215,00
Total		162.670.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.670.897,00	235.984.966,00	201.572.209,00	215.968.527,00



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 04 - Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya
 05 - Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online
 3. PROGRAM : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI
 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Mahkamah Konstitusi RI
 5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
Total		0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel		10.623.581,00
01.01	Tingkat Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	60	
02	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online		0,00
02.01	Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Data dan Informasi Penanganan Perkara	70	
02.02	Persentase Downtime Layanan TIK	3	
Total			10.623.581,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Mahkamah Konstitusi	10.623.581,00
01.01	Tingkat Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Peradilan Konstitusl	
01.02	Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi	
01.03	Tingkat Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	
Total		10.623.581,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022	
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN									
3370	Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana	10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00	20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00
Total		10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00	20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 01 - Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara
 02 - Meningkatkan Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara
 03 - Meningkatkan Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusional
 04 - Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Terpercaya
3. PROGRAM : Program Penanganan Perkara Konstitusi
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Mahkamah Konstitusi RI
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	231.548.836,00
05.02	Kesuksesan Pemilihan Umum	231.548.836,00
Total		231.548.836,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Integrasi Data dan Informasi dalam Penanganan Perkara		0,00
01.01	Tingkat Maturitas Aplikasi Penanganan Perkara	3	
01.02	Tingkat Integrasi Aplikasi Penanganan Perkara	75	
02	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara		0,00
02.01	Persentase Jumlah Perkara PUI, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus	80	
02.02	Persentase Jumlah Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	100	
02.03	Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUI, SKLN, dan Perkara Lainnya	80	
02.04	Rata-Rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	100	
03	Meningkatnya Kualitas Kebijakan yang Memudahkan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sistem Peradilan Konstitusional		0,00
03.01	Tingkat Ketersediaan Peraturan Penanganan Perkara	100	
03.02	Tingkat Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kebijakan Penanganan Perkara	80	
04	Tersedianya Materi Kebijakan Penanganan Perkara Konstitusi		0,00
04.01	Persentase Tersedianya Konsep DIM (Daftar Inventaris Masalah) Perubahan/Persempurnaan Kebijakan	90	
04.02	Persentase Tersedianya Draft Materi Kebijakan (PMK, PKMK, Persejken, dan Peraturan terkait lainnya)	100	
05	Terwujudnya Pelayanan Peradilan yang Cepat, Transparan, dan Berintegritas		0,00
05.01	Persentase Pelayanan Teknis Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	90	
05.02	Persentase Pelayanan Administrasi Perkara dalam Penanganan Perkara Konstitusi	100	
05.03	Persentase Pelayanan Teknis Kegiatan Peradilan dalam Penanganan Perkara Konstitusi	96	
05.04	Persentase Pengolahan Data Perkara dan Putusan	90	
05.05	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan berperkara di Mahkamah Konstitusi	75	
06	Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Efektif dan Efisien		0,00
06.01	Tingkat Penerapan e-Court	70	
07	Meningkatnya Dukungan Substantif terhadap Penanganan Perkara		0,00
07.01	Persentase Hasil Kajian Perkara	90	
07.02	Persentase Hasil Telaah Perkara	90	
07.03	Persentase Penyusunan Konsep Pendapat Hukum	90	
Total			0,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Putusan Mahkamah Konstitusi	336.280.945,00
01.01	Indeks Pelayanan Penanganan Perkara	
01.02	Persentase Jumlah Perkara PUI, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	
01.03	Persentase Jumlah Perkara PPHU Gubernur, PPHU Bupati, dan PPHU Walikota yang diputus	
Total		336.280.945,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKATOR PENDANAAN TAHUN 2019										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
3372	Penanganan Perkara PUI, SKLN, PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden, PPHU Gubernur, PPHU Bupati, PPHU Walikota dan Perkara Lainnya	336.280.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.280.945,00	219.453.140,00	186.786.868,00	218.394.483,00
Total		336.280.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.280.945,00	219.453.140,00	186.786.868,00	218.394.483,00



REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 06 - Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi
 08 - Meningkatkan Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK
3. PROGRAM : Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) : Mahkamah Konstitusi RI
5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2019 (RIBU)
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	10.800.000,00
05.02	Kesuksesan Pemilihan Umum	10.800.000,00
Total		10.800.000,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Pendidikan Warga Negara tentang Pancasila dan Konstitusi		30.069.978,00
01.01	Indeks Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	75	
01.02	Tingkat Pemahaman Materi Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	75	
02	Meningkatnya Kapasitas Warga Negara dalam Berperkara di MK		0,00
02.01	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	75	
Total			30.069.978,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Peserta yang paham dan sadar konstitusi	30.069.978,00
01.01	Indeks Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	
Total		30.069.978,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2020	2021	2022
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								

3373	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	30.069.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069.978,00	48.813.325,00	53.694.658,00	59.064.123,00
Total		30.069.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069.978,00	48.813.325,00	53.694.658,00	59.064.123,00

Jakarta, 01 November 2018
 Sekretaris Jenderal



KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HON					
01.958.001.051	Penyelenggaraan Kehumasan	Utama	1.599.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.200,00
01.964	Layanan Kerjasama Internasional		13.469.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469.073,00
01.964.001	Tanpa Sub Output		13.469.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469.073,00
01.964.001.051	Kerjasama Internasional	Utama	13.469.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.469.073,00
	Total		17.468.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.468.273,00

Jakarta, 01 November 2018
 Sekretaris Jenderal

 Prof. Dr. M. Gusni P. Cahya, S.H., M.H.
 NIP. 196301081990021001

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
		Pusat	Pusat									682.100,00
Total												60.194.754,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Terwujudnya Layanan Perencanaan yang Berkualitas				59.312.654,00				67.871.571,00	66.147.643,00	67.001.319,00
01.952	Layanan Perencanaan	1	Layanan		2.632.850,00				6.638.970,00	4.802.868,00	5.533.154,00
01.952.001	Tanpa Sub Output				2.632.850,00				6.638.970,00	4.802.868,00	5.533.154,00
01.952.001.051	Penyusunan Rencana Anggaran	13,00	Dokumen	15.384,62	200.000,00	13,00	13,00	13,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00
01.952.001.052	Penyusunan Rencana Program	16,00	Laporan	150.990,63	2.415.850,00	16,00	14,00	14,00	6.354.675,00	4.490.143,00	5.189.157,00
01.952.001.053	Penyusunan Rencana Kinerja	2,00	Dokumen	8.500,00	17.000,00	2,00	2,00	2,00	64.295,00	70.725,00	77.797,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan		310.000,00				683.796,00	752.176,00	827.393,00
01.953.001	Tanpa Sub Output				310.000,00				683.796,00	752.176,00	827.393,00
01.953.001.051	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja	9,00	Laporan	4.804,44	43.240,00	9,00	9,00	9,00	271.645,00	298.810,00	328.690,00
01.953.001.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	45,00	Laporan	5.928,00	266.760,00	45,00	45,00	45,00	412.151,00	453.366,00	498.703,00
01.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan		157.982,00				437.945,00	481.739,00	529.912,00
01.955.001	Tanpa Sub Output				157.982,00				437.945,00	481.739,00	529.912,00
01.955.001.051	Pembinaan Administrasi Keuangan	12,00	Layanan	5.460,50	65.526,00	12,00	12,00	12,00	336.243,00	369.867,00	406.853,00
01.955.001.052	Penyusunan Laporan Keuangan	17,00	Laporan	5.438,59	92.456,00	17,00	17,00	17,00	101.702,00	111.872,00	123.059,00
01.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		56.411.822,00				60.110.860,00	60.110.860,00	60.110.860,00
01.994.001	Tanpa Sub Output				56.411.822,00				60.110.860,00	60.110.860,00	60.110.860,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	12,00	Layanan	4.700.985,17	56.411.822,00	12,00	12,00	12,00	60.110.860,00	60.110.860,00	60.110.860,00
05	Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat MK				682.100,00				2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
05.965	Layanan Audit Internal	1	Layanan		682.100,00				2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
05.965.001	Tanpa Sub Output				682.100,00				2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
05.965.001.051	Pengawasan Intern	30,00	Dokumen	22.736,67	682.100,00	30,00	30,00	30,00	2.300.000,00	2.530.000,00	2.783.000,00
Total					60.194.754,00	-	-	-	70.171.571,00	68.677.643,00	69.784.319,00

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01	Terwujudnya Layanan Perencanaan yang Berkualitas		59.312.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.312.654,00
01.952	Layanan Perencanaan		2.632.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.850,00
01.952.001	Tanpa Sub Output		2.632.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.850,00
01.952.001.051	Penyusunan Rencana Anggaran	Utama	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01.952.001.052	Penyusunan Rencana Program	Utama	2.415.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415.850,00
01.952.001.053	Penyusunan Rencana Kinerja	Utama	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
01.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
01.953.001	Tanpa Sub Output		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
01.953.001.051	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja	Utama	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.240,00
01.953.001.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Utama	266.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.760,00
01.955	Layanan Manajemen Keuangan		157.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.982,00
01.955.001	Tanpa Sub Output		157.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.982,00
01.955.001.051	Pembinaan Administrasi Keuangan	Utama	65.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.526,00
01.955.001.052	Penyusunan Laporan Keuangan	Utama	92.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.456,00
01.994	Layanan Perkantoran		56.411.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.411.822,00
01.994.001	Tanpa Sub Output		56.411.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.411.822,00
01.994.001.001	Gaji dan Tunjangan	Pendukung	56.411.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.411.822,00
05	Meningkatnya Implementasi SPIP dan Profesionalisme Aparat Pengawasan di Inspektorat MK		682.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.100,00
05.965	Layanan Audit Internal		682.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.100,00
05.965.001	Tanpa Sub Output		682.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.100,00
05.965.001.051	Pengawasan Intern	Utama	682.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.100,00
Total			60.194.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.194.754,00





REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
 2. PROGRAM : 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI
 3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan yang Transparan, Bersih dan Akuntabel
 02 - Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Penanganan Perkara secara Online
 4. KEGIATAN : 3370 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Biro Umum
 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2019	ALOKASI 2019 (RIBU)
01	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel		10.623.581,00
01.01	Persentase Penggunaan e-Procurement	60	
01.02	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa sesuai rencana	92	
02	Meningkatnya Akses Seluas Mungkin Kepada Masyarakat terhadap Permohonan Proses Perkara secara Online		0,00
02.01	Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Data dan Informasi Penanganan Perkara	70	
02.02	Persentase Downtime Layanan TIK	3	
Total			10.623.581,00

7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	KERANGKA REGULASI	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA									
01	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel											10.623.581,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal								000 - Bukan Tematik		tidak	10.623.581,00
01.951.001	Tanpa Sub Output											10.623.581,00
	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran											6.586.460,00
		Pusat	Pusat									6.586.460,00
	054 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan											4.037.121,00
		Pusat	Pusat									4.037.121,00
Total												10.623.581,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2019				PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2019 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	
01	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel				10.623.581,00					20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1	Layanan	10.623.581,00					20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00
01.951.001	Tanpa Sub Output				10.623.581,00					20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	4,00	Paket	1.646.615,00	6.586.460,00	6,00	4,00	4,00	19.800.000,00	9.675.000,00	6.537.500,00	
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	1,00	Paket	4.037.121,00	4.037.121,00	1,00	2,00	0,00	500.000,00	12.000.000,00	13.500.000,00	
Total					10.623.581,00	-	-	-	20.300.000,00	21.675.000,00	20.037.500,00	

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019											
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN						
01	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan, Bersih dan Akuntabel		10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00
01.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00
01.951.001	Tanpa Sub Output		10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00
01.951.001.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Utama	6.586.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586.460,00
01.951.001.054	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Utama	4.037.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.121,00
Total			10.623.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623.581,00

Jakarta, 01 November 2018
 Sekretaris Jenderal

 Prof. Dr. M. Guntur Huzar, S.H., M.H.
 NIP. 196501081990024001



KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
0.002.001.051	Penelitian dan Pengujian Perkara Konstitusional	Utama	6.282.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282.900,00
0.002.001.052	Penyusunan Jurnal Konstitusional	Utama	826.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.680,00
0.002.001.053	Pengadaan Buku dan Bahan Hukum Konstitusional dan Ketatanegaraan	Utama	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
0.002.001.054	Pengelolaan Layanan Perpustakaan	Utama	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
0.002.001.055	Pengelolaan Pusat Sejarah Konstitusional dan MK	Utama	418.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.330,00
0.003	Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota yang diputus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.003.001	Tanpa Sub Output		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.003.001.051	Penanganan Perkara PHP Gubernur, PHP Bupati dan PHP Walikota	Utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.004	Peraturan MK dan Petunjuk Teknis		606.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.920,00
0.004.001	Tanpa Sub Output		606.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.920,00
0.004.001.051	Penyusunan Peraturan dan Petunjuk Teknis	Utama	606.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.920,00
0.005	Dukungan Pelaksanaan Tugas Konstitusional MK		9.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.000,00
0.005.001	Tanpa Sub Output		9.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.000,00
0.005.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pendukung	9.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599.000,00
0.006	Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi		16.909.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909.659,00
0.006.001	Tanpa Sub Output		16.909.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909.659,00
0.006.001.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pendukung	16.909.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909.659,00
0.007	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus		231.548.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.548.836,00
0.007.001	Tanpa Sub Output		231.548.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.548.836,00
0.007.001.051	Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	Utama	231.548.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.548.836,00
	Total		336.280.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.280.945,00



KODE	SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.001.001.051	Perencanaan dan Pengembangan Program dan Kurikulum Pendidikan	Utama	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
01.001.001.052	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	Utama	13.967.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.967.900,00
01.003	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Akademi/Perencana Pemilu/Praktisi Hukum/Perencana Negara		10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
01.003.001	Tanpa Sub Output		10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
01.003.001.051	Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Akademi/Perencana Pemilu/Praktisi Hukum/Perencana Negara	Utama	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
02	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan		5.022.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.078,00
02.002	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK		5.022.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.078,00
02.002.001	Tanpa Sub Output		5.022.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.078,00
02.002.001.051	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	Utama	5.022.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022.078,00
Total			30.069.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.069.978,00

